

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DIPERJUALBELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (ETF)

**Oleh:
IIS FAIZAH HASRI**

Reksadana di Indonesia yang paling dikenal salah satunya adalah reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksadana KIK mengeluarkan produk terbaru yaitu reksadana ETF. Permasalahan dalam penelitian ini pertama, mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksadana ETF, kedua mekanisme perdagangan reksadana *ETF*, ketiga perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana ETF.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, mekanisme pembentukan reksadana ETF sama seperti pembentukan pada reksadana KIK. Pada dasarnya proses pembentukan reksadana yaitu tetap berpedoman pada peraturan Bapepam-LK No IV.B2. Kedua, perdagangan reksadana ETF adalah calon investor dapat membeli langsung efek-efek tersebut di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana ETF adalah berpedoman kepada UUPM. Perlindungan Hukum disini terkait pelanggaran apabila ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Kata Kunci : Reksadana, Pemegang Efek, Perlindungan Hukum